

**“ANALISIS KINERJA SEKOLAH DASAR KOTA BANDUNG DALAM
MENGIMPLEMENTASIKAN PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF
UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI TAHUN 2023”**

Tiara Hasna Raharja*), Puji Astuti), Lusia Astrika**)**

Email: tiarahasna12@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro, Indonesia

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Telepon: (024)7465407 Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pendidikan inklusif di sekolah dasar di Kota Bandung dengan fokus pada kinerja layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) pada tahun 2023. Pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang memastikan semua siswa, termasuk ABK, mendapatkan kesempatan belajar bersama dalam lingkungan yang sama tanpa diskriminasi. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang perlu dikaji lebih dalam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus yang dilakukan di dua sekolah, yaitu SD Negeri 206 Putraco Indah dan SD Swasta Assalaam Bandung. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan teori kinerja oleh Robbins (1996), yang mencakup lima dimensi utama: kualitas, kuantitas, kerja sama, inisiatif, dan tanggung jawab.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pendidikan inklusif telah diterapkan di kedua sekolah, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Di SD Negeri 206 Putraco Indah, keterbatasan fasilitas, tenaga pendamping dan kurangnya pemahaman guru mengenai metode pembelajaran inklusif menjadi kendala utama. Sementara itu, di SD Swasta Assalaam Bandung, memiliki dukungan fasilitas lebih baik, tetapi masih ditemukan kesenjangan dalam pemerataan bantuan akomodasi pendukung dari Pemerintah. Faktor pendukung yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi komitmen kepala sekolah dan guru, serta adanya pelatihan bagi tenaga pengajar.

Rekomendasi yang dihasilkan dalam penelitian ini diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, pemerataan ketersediaan fasilitas pendukung, pemberlakuan monitoring, evaluasi serta pelatihan secara berkala dan memperkuat koordinasi antara sekolah, orang tua, serta pemerintah. Dengan perbaikan tersebut diharapkan penyelenggaraan program pendidikan inklusif dapat dilaksanakan dengan efektif sesuai dengan kebutuhan para anak inklusi.

Kata Kunci: Pendidikan Inklusif, Anak Berkebutuhan Khusus, Kinerja Layanan Pendidikan, Kebijakan Publik.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of inclusive education programs in elementary schools in Bandung, focusing on the quality of educational services for children with special needs in 2023. Inclusive education is an approach that ensures all students, including children with special needs, have the opportunity to learn together in the same environment without discrimination. However, its implementation still faces various challenges that require further examination.

This research employs a qualitative descriptive approach with a case study conducted in two schools: SD Negeri 206 Putraco Indah and SD Swasta Assalaam Bandung. Data were collected through in-depth interviews, direct observations, and document analysis. The data analysis was carried out using the performance theory proposed by Robbins (1996), which includes five key dimensions: quality, quantity, cooperation, initiative, and responsibility.

The findings indicate that although inclusive education has been implemented in both schools, several challenges remain. At SD Negeri 206 Putraco Indah, the main obstacles include a lack of support staff and limited teacher understanding of inclusive teaching methods. Meanwhile, at SD Swasta Assalaam Bandung, better facilities are available, but gaps still exist in parental involvement and curriculum adaptation for children with special needs. Supporting factors identified in this study include the commitment of school principals and teachers, as well as the availability of training programs for educators.

The recommendations from this study emphasize the need for further efforts to enhance teacher competence, ensure the equitable distribution of supporting facilities, implement regular monitoring and evaluation, and strengthen coordination between schools, parents, and the government. These improvements are expected to enhance the effectiveness of inclusive education programs and ensure they meet the needs of children with special needs.

Keywords: Inclusive Education, Children with Special Needs, Educational Service Quality, Public Policy.

PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai Undang-Undang yang memuat terkait Sistem Pendidikan Nasional, hal ini tertuang pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 yang berkaitan dengan Sistem Pendidikan Nasional. Pada Bab III pasal 6, menjelaskan jika tiap-tiap warga negara memiliki hak atas partisipasi yang sebesar-besarnya dalam pendidikan, guna mendapatkan wawasan, keterampilan, serta kemampuan sekurang-kurangnya sama dengan lulusan pendidikan dasar.

Dengan begitu dapat dilihat bahwa peraturan tersebut telah mengatur agar setiap anak di Indonesia dapat memperoleh fasilitas dan pelayanan pendidikan yang bermutu dan layak, namun pada kenyataannya banyak di antara mereka yang memiliki latar belakang sebagai anak berkebutuhan khusus seringkali sulit memperoleh hak pendidikan yang penuh dan setara.

Menelisik lebih dalam lagi terkait anak berkebutuhan khusus, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 70 Tahun 2009, memberikan penjelasan bahwa

pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan terkait pendidikan inklusif guna anak berkebutuhan khusus. Meninjau dalam realita yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, anak non disabilitas serta anak disabilitas sebagai suatu perihal yang tidak seharusnya untuk dipisahkan. Pendidikan inklusif dirancang untuk menciptakan sistem pembelajaran yang menyatukan seluruh peserta didik dalam satu lingkungan yang setara, dengan memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Model pendidikan ini tidak membedakan peserta didik berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, politik, bahasa, gender, lokasi geografis, maupun kondisi fisik dan mental.

Pendidikan inklusif telah diterapkan di banyak daerah di wilayah Indonesia, termasuk di Kota Bandung. Kota Bandung sendiri telah dicanangkan sebagai kota pendidikan inklusif pada 26 Oktober 2015. Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung saat itu, menyatakan bahwa seluruh anak di Kota Bandung, termasuk anak penyandang disabilitas, berhak mendapatkan fasilitas serta pelayanan pendidikan yang sama. Pemerintah Kota Bandung juga mengeluarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 420 Tahun 2016 tentang Petunjuk penyelenggaraan dalam mengelola bantuan operasional sekolah kota Bandung, Bantuan Walikota khusus sekolah, Bantuan operasional sekolah murid yang kurang mampu, Bantuan walikota khusus mahasiswa

pendidikan karakter, Bandung Masagi, Pengembangan teknologi informasi serta komunikasi dalam sektor pendidikan serta literasi dan pelayanan pendidikan inklusif dalam pelaksanaan program sekolah gratis pemerintah kota Bandung tahun anggaran 2016.

Dalam peraturan Walikota Bandung No. 420 Tahun 2016, Pada Bab 1, Pasal 1 nomor 12, tertulis bahwa Layanan inklusif ialah pelayanan pendidikan yang ramah dan non-diskriminatif yang mengedepankan serta menghormati keberagaman dan juga meminimalkan hambatan bagi siswa. Selain itu, pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 yang berkaitan dengan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 58 nomor 3 juga tertulis bahwa tersedia “Jalur non-akademik seperti yang dimaksud di ayat (1), yang mana salah satu poin yang tercantum adalah kuota untuk anak berkebutuhan khusus. Maka berdasarkan riset serta peraturan yang telah ada, dapat dilihat bahwa program pendidikan inklusif sudah mulai diimplementasikan di kota Bandung.

Namun meskipun kebijakan pendidikan inklusif masih berlangsung hingga saat ini, penyelenggaraan pendidikan inklusif yang ada di Kota Bandung masih belum optimal. Hal ini didukung dari data berikut.

Tabel 1. Jumlah Data ABK di Sekolah Inklusi Kota Bandung

Tahun	Jumlah ABK di Sekolah Inklusif
2021	848 Siswa
2022	961 Siswa
2023	970 Siswa

Sumber : *Open Data* Kota Bandung
2021 – 2023

Selain itu data dari Dapo Dikdasmen Kemendikbud (2019) menyebutkan bahwa pada tahun 2019, Terdapat 42 SLB dengan daya tampung kurang lebih sebesar 2000 siswa di Kota Bandung. Daya tampung tersebut pastinya tak mampu menyerap total anak berkebutuhankhusus secara keseluruhan dengan merata. Adapun data yang diperoleh dari *website* Open Data Kota Bandung mengenai jumlah Sekolah Dasar Kota Bandung pada tahun 2021.

Tabel 2. Jumlah Sekolah Dasar Kota Bandung Pada Tahun 2021

Total Keseluruhan SD	497 Sekolah
Total Keseluruhan SD Inklusi	237 Sekolah

Sumber : *Open Data* Kota Bandung 2021

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan pendidikan inklusif di Kota Bandung masih belum optimal, mengingat jumlah sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan

inklusif belum mencapai 50%. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara tujuan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan kondisi aktual implementasi di lapangan. Meskipun kebijakan pendidikan inklusif telah dirumuskan untuk memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, kenyataannya masih banyak sekolah dasar di kota Bandung yang belum sepenuhnya menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Alasan pemilihan Kota Bandung sebagai lokasi penelitian didasarkan pada fakta bahwa pada tahun 2015, Kota Bandung telah mencanangkan diri sebagai kota pendidikan inklusif. Namun, meskipun kebijakan ini telah dicanangkan, penerapannya masih belum dilakukan secara merata di seluruh sekolah di Kota Bandung. Kondisi ini menunjukkan adanya gap yang cukup signifikan antara kebijakan yang diusung dan kenyataan yang ada di lapangan, yang mendorong perlunya penelitian lebih mendalam.

Pendidikan inklusif sejak usia dini berperan penting dalam membantu anak berkebutuhan khusus mengembangkan kepercayaan diri, keterampilan sosial, dan karakter yang kuat. Bagi anak non-disabilitas, keberadaan teman sebaya dengan keterbatasan menjadi kesempatan untuk

menumbuhkan toleransi, empati, dan keterampilan adaptasi sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja Sekolah Dasar di Kota Bandung dalam menerapkan pendidikan inklusif, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas dan pemerataan implementasinya.

Penelitian dilakukan di dua Sekolah Dasar di Kota Bandung, mencakup sekolah negeri dan swasta sebagai objek komparasi. SD Assalaam Bandung, sebagai salah satu sekolah swasta unggulan, telah menerapkan kurikulum nasional dengan metode pembelajaran inklusif dan menerima siswa disabilitas sejak 2005. Sementara itu, SDN 206 Putraco Indah Bandung mulai menerima siswa disabilitas sejak 2015 dan telah menyesuaikan pendekatan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Kedua sekolah ini dipilih karena lebih awal menerapkan pendidikan inklusif dibandingkan sekolah dasar lainnya di Kota Bandung.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktek program dan aspek yang menghambat penyelenggaraan program pendidikan inklusif dalam Sekolah Dasar Kota Bandung.

KERANGKA TEORI

Teori kinerja yang dikemukakan oleh Robbins (1996), yang mencakup lima dimensi

utama: kualitas, kuantitas, kerja sama, inisiatif, dan tanggung jawab.

Teori marginalisasi yang dikemukakan oleh Alcock (1993), yang menekankan pada proses marginalisasi sosial kelompok-kelompok yang terpinggirkan, serta bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi akses dan kesempatan dalam pendidikan.

Teori Eksklusi Sosial yang dikemukakan oleh Giddens (2006) menggambarkan bagaimana individu atau kelompok tertentu dapat terisolasi dari partisipasi penuh dalam kehidupan sosial yang lebih luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis implementasi pendidikan inklusif di SD Assalaam Bandung dan SDN 206 Putraco Indah Bandung. Subjek penelitian mencakup kepala sekolah, guru, panitia PPDB, serta orang tua siswa inklusi, sementara objeknya adalah praktik pendidikan inklusif di kedua sekolah tersebut.

Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen dan literatur yang relevan. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk memastikan validitas, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan

membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kinerja Sekolah Dasar Kota Bandung Dalam Mengimplementasikan Program Pendidikan Inklusif Anak Berkebutuhan Khusus Di Tahun 2023

- **Kualitas**

SD Assalaam Bandung memiliki fasilitas inklusif yang lebih lengkap dibandingkan SDN 206 Putraco Indah. Sekolah ini menyediakan Program Pembelajaran Individual (PPI) dengan alat bantu terapi serta tenaga profesional seperti psikolog dan *helper* yang mendampingi anak berkebutuhan khusus. Keberadaan fasilitas ini sejalan dengan amanat Permendikbud No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, yang menekankan pentingnya dukungan sarana prasarana bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Sebaliknya, SDN 206 Putraco Indah mengalami keterbatasan fasilitas dan hanya mengandalkan satu *helper* berpengalaman, dengan alat bantu yang kurang terawat, sehingga belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan dalam regulasi tersebut.

Dari aspek kompetensi khusus para penyelenggara Pendidikan Inklusif di Sekolah

Dasar, SD Assalaam Bandung tidak memiliki tenaga pendidik dengan latar belakang Pendidikan Luar Biasa (PLB), tetapi mengatasi keterbatasan tersebut dengan mengadakan pelatihan rutin serta konsultasi dengan psikolog dan orthopedagog. Di sisi lain, SDN 206 Putraco Indah memiliki tiga guru dengan latar belakang PLB serta satu *helper* berpengalaman, tetapi pelatihan bagi guru lebih jarang dilakukan dibandingkan SD Assalaam Bandung. Keterbatasan ini menghambat penguatan kapasitas guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak inklusi. Berkaitan dengan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 pada Pasal 10 dimana pemerintah mewajibkan sekolah memiliki minimal satu Guru Pembimbing Khusus (GPK), kedua sekolah ini telah menunjukkan upaya untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Namun, terbatasnya jumlah guru dan *helper* di sekolah ini menjadi tantangan utama. SDN 206 Putraco Indah perlu menambah jumlah tenaga pendukung, terutama dalam hal sumber daya Guru Pembimbing Khusus (GPK), untuk memastikan keberhasilan pendidikan inklusif.

Pada Konteks Standarisasi penerimaan anak inklusi di Sekolah Dasar, SD Assalaam Bandung menerapkan seleksi yang ketat dengan mengacu pada tes psikologi dan pemeriksaan riwayat kesehatan sebelum siswa inklusi diterima. Sebaliknya, SDN 206 Putraco Indah tidak memiliki standar seleksi

khusus, sehingga jumlah siswa berkebutuhan khusus cenderung berlebih tanpa ada mekanisme pengendalian, bahkan melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah Kota Bandung pada Peraturan Wali Kota Bandung No. 420 Tahun 2016 yang mencantumkan bahwa kuota untuk peserta didik disabilitas dan keluarga ekonomi tidak mampu adalah sebesar 15%. Akibatnya, sekolah mengalami ketidakseimbangan rasio guru dan siswa, yang pada akhirnya menyebabkan penghentian sementara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk memberi kesempatan sekolah lain dalam mempersiapkan sistem inklusif yang lebih baik.

Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan pendidikan inklusif tidak hanya bergantung pada kebijakan internal sekolah, tetapi juga membutuhkan dukungan yang lebih konkret dari pemerintah dalam bentuk bantuan fasilitas, peningkatan kompetensi guru, dan pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB inklusif. Dengan penguatan regulasi yang lebih ketat dan implementasi yang konsisten, diharapkan sekolah inklusif dapat memberikan layanan pendidikan yang lebih layak dan merata bagi seluruh peserta didik berkebutuhan khusus.

- **Kuantitas**

Alokasi waktu khusus yang diberikan oleh sekolah dasar bagi pendampingan anak inklusi menjadi indikator penting dalam penilaian kinerja pendidikan inklusif. Permendikbud No. 157 Tahun 2014 Pasal 10

Ayat 3 mengamanatkan bahwa satuan pendidikan wajib menyediakan waktu tambahan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap siswa inklusi mendapatkan dukungan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

SD Assalaam Bandung telah menerapkan kebijakan alokasi waktu tambahan bagi tenaga pendidik dan siswa inklusi secara lebih terstruktur. Guru di sekolah ini mendapatkan pelatihan pendidikan inklusif sebanyak dua kali dalam setahun, sementara *helper* menerima pelatihan intensif setiap minggu dalam bentuk sesi coaching yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Selain itu, sekolah juga menyediakan waktu tambahan khusus untuk anak inklusi setiap minggunya melalui Program Pembelajaran Individual (PPI), di mana anak berkebutuhan khusus mendapatkan sesi belajar selama satu jam dengan alat bantu terapi dan pendampingan psikolog.

Sebaliknya, SDN 206 Putraco Indah belum memiliki sistem alokasi waktu tambahan yang terstruktur bagi tenaga pendidik dan siswa inklusi. Guru di sekolah ini hanya mengikuti pelatihan eksternal yang diadakan secara gratis di luar sekolah, dan meskipun terdapat pelatihan dua kali setahun yang diselenggarakan pemerintah, intensitas pelatihannya tidak rutin. Bahkan, sejak tahun 2023, SDN 206 Putraco Indah tidak lagi dilibatkan dalam pelatihan yang diadakan

oleh pemerintah. Untuk siswa inklusi, sekolah ini tidak memiliki jadwal khusus untuk sesi pembelajaran tambahan. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya jumlah *helper* hanya terdapat satu *helper* untuk mendampingi seluruh anak inklusi serta kurangnya anggaran untuk mendukung penyelenggaraan waktu belajar tambahan yang lebih optimal.

Perbedaan dalam alokasi waktu khusus ini menunjukkan bahwa SD Assalaam Bandung lebih siap dalam memenuhi standar yang diamanatkan oleh Permendikbud No. 157 Tahun 2014, terutama dalam menyediakan waktu tambahan untuk pembelajaran inklusif. Dengan adanya pelatihan yang rutin dan sesi pembelajaran tambahan yang terstruktur, sekolah ini memastikan bahwa guru dan *helper* memiliki kompetensi yang terus diperbarui, sehingga siswa inklusi mendapatkan dukungan yang lebih efektif.

Sebaliknya, keterbatasan sumber daya di SDN 206 Putraco Indah berdampak pada minimnya kesempatan bagi tenaga pendidik untuk meningkatkan keterampilan mereka serta kurangnya waktu belajar tambahan bagi anak berkebutuhan khusus. Padahal, studi yang dipublikasikan dalam *International Journal of Special Education* (Sharma et al., 2011) menegaskan bahwa pelatihan berkelanjutan berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan diri guru dalam menerapkan metode pendidikan inklusif yang efektif.

Untuk mengatasi tantangan ini, SDN 206 Putraco Indah perlu meningkatkan frekuensi dan kualitas pelatihan bagi tenaga pendidiknya serta mencari solusi dalam penyediaan alokasi waktu khusus bagi siswa inklusi. Langkah-langkah yang dapat diambil antara lain memperbanyak kerja sama dengan lembaga pelatihan, mencari tambahan sumber daya pendamping, serta mengoptimalkan kebijakan sekolah agar setiap siswa berkebutuhan khusus mendapatkan kesempatan belajar yang setara. Dengan pendekatan yang lebih sistematis, pendidikan inklusif dapat berjalan lebih efektif, sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

- **Kerjasama**

Kerja sama merupakan elemen penting dalam keberhasilan implementasi pendidikan inklusif di sekolah dasar. Efektivitas program ini sangat bergantung pada sinergi antara kepala sekolah, guru, panitia PPDB, orang tua, serta pihak eksternal yang dapat mendukung proses pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus. Dengan adanya koordinasi yang baik, setiap pihak dapat berkontribusi sesuai dengan perannya, sehingga lingkungan belajar yang inklusif dapat terwujud secara optimal.

Dalam konteks kerja sama internal, SD Assalaam Bandung telah menerapkan sistem koordinasi yang sistematis dengan melibatkan kepala sekolah, guru, dan panitia PPDB dalam forum rutin. Melalui forum ini,

setiap pihak diberikan pemahaman yang jelas mengenai perannya dalam mendukung pendidikan inklusif. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan program inklusi, sementara guru menerima pelatihan khusus sebelum menangani siswa berkebutuhan khusus, sehingga mereka dapat memberikan perhatian yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Panitia PPDB juga berperan dalam memastikan proses seleksi dan penerimaan siswa inklusi dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan sekolah serta kebutuhan siswa secara individual. Sementara itu, di SDN 206 Putraco Indah, kerja sama lebih terfokus pada koordinasi antar guru dalam mendampingi siswa inklusi di dalam kelas. Meskipun kerja sama ini berjalan cukup baik dalam menghadapi kendala yang muncul selama proses pembelajaran, keterlibatan kepala sekolah dan panitia PPDB tidak dijelaskan secara spesifik. Narasumber lebih menekankan bahwa guru memiliki peran yang dominan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, karena mereka berinteraksi langsung dengan siswa setiap hari.

Selain koordinasi di lingkungan sekolah, keterlibatan orang tua juga menjadi faktor penting dalam mendukung pendidikan inklusif. SD Assalaam Bandung telah membangun komunikasi yang efektif dengan orang tua melalui aplikasi WhatsApp dan koordinasi rutin saat pengambilan rapor. Tidak hanya sekadar memberikan laporan

perkembangan akademik, komunikasi ini juga mencakup konsultasi khusus antara *helper*, orthopedagog, dan orang tua untuk membahas perkembangan serta kendala yang dihadapi siswa secara lebih mendalam. Pendekatan ini memungkinkan adanya pemantauan yang lebih komprehensif terhadap perkembangan siswa dan memastikan bahwa dukungan yang diberikan sekolah selaras dengan kebutuhan di rumah. Di SDN 206 Putraco Indah, komunikasi dengan orang tua juga dilakukan saat pengambilan rapor, di mana terdapat catatan khusus mengenai perkembangan anak inklusi. Jika muncul kendala dalam proses pembelajaran, orang tua juga dilibatkan dalam diskusi untuk mencari solusi terbaik. Meskipun pola komunikasi ini cukup baik, masih terdapat ruang untuk meningkatkan efektivitasnya, terutama dalam aspek konsultasi rutin yang lebih intensif seperti yang telah diterapkan di SD Assalaam.

Dari aspek kerja sama dengan pihak eksternal, SD Assalaam Bandung menunjukkan pendekatan yang lebih proaktif dengan menjalin kolaborasi dengan SD Mutiara Bunda, salah satu sekolah inklusi yang juga telah diakui oleh Pemerintah Kota Bandung. Melalui studi banding, kedua sekolah saling bertukar informasi dan pengalaman dalam mengembangkan pendidikan inklusif. Selain itu, SD Assalaam juga bekerja sama dengan Anahata Layanan Psikologi dalam penyediaan *helper* dan orthopedagog yang mendampingi siswa

inklusi selama proses pembelajaran di kelas. Keberadaan tenaga profesional ini membantu dalam menyesuaikan metode pembelajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Namun, kerja sama dengan Pemerintah Kota Bandung masih terbatas pada koordinasi dalam hal monitoring dan penyampaian informasi terbaru terkait kebijakan pendidikan inklusif.

Di sisi lain, SDN 206 Putraco Indah hanya mengandalkan kerja sama dengan Pemerintah Kota Bandung, yang frekuensinya masih terbilang jarang. Minimnya kolaborasi dengan lembaga pendidikan lain, organisasi masyarakat, atau penyedia sumber daya tambahan mengakibatkan terbatasnya akses terhadap dukungan yang lebih luas. Tidak adanya kerja sama dengan pihak eksternal di luar pemerintah juga membatasi inovasi dalam implementasi pendidikan inklusif di sekolah ini, sehingga strategi yang diterapkan cenderung kurang bervariasi dibandingkan dengan SD Assalaam.

Berdasarkan hasil analisis, terlihat bahwa SD Assalaam Bandung lebih aktif dalam membangun kerja sama di berbagai tingkatan, baik internal maupun eksternal, sehingga implementasi pendidikan inklusif dapat berjalan lebih efektif. Dengan adanya forum rutin di internal sekolah, komunikasi dengan orang tua yang lebih intensif, serta kolaborasi dengan lembaga eksternal, SD Assalaam mampu menghadirkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mendukung

siswa inklusi. Sementara itu, SDN 206 Putraco Indah menunjukkan kerja sama yang cukup baik di antara guru dalam mendampingi siswa inklusi, namun keterlibatan pihak eksternal masih terbatas. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pendidikan inklusif, SDN 206 Putraco Indah perlu memperluas jaringan kerja sama, baik dengan lembaga pendidikan lain, organisasi yang mendukung inklusi, maupun tenaga profesional yang dapat memberikan dukungan tambahan.

Keseluruhan temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif di sekolah dasar tidak hanya bergantung pada regulasi pemerintah, tetapi juga pada sejauh mana sekolah mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak. Dengan memperkuat kerja sama yang lebih luas dan terstruktur, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan siswa berkebutuhan khusus.

- **Inisiatif**

Inisiatif sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif karena menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan program tersebut, tanpa adanya inisiatif dari sekolah dalam menyusun program penyesuaian khusus bagi siswa berkebutuhan khusus serta inisiatif dari para pendidik dalam menghadapi tantangan yang muncul, proses pendidikan inklusif akan mengalami hambatan yang signifikan.

Kesadaran dan inisiatif pribadi para tenaga pendidik sangat berpengaruh terhadap efektivitas proses belajar mengajar, terutama dalam menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan spesifik siswa inklusi. Dalam analisis ini, inisiatif yang dilakukan oleh SD Assalaam Bandung dan SDN 206 Putraco Indah dalam implementasi pendidikan inklusif akan dibandingkan untuk memahami sejauh mana kedua sekolah ini berupaya menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan responsif terhadap kebutuhan siswa berkebutuhan khusus.

SD Assalaam Bandung telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menyesuaikan program pembelajaran bagi anak inklusi dengan berbagai strategi yang sistematis dan terencana. Sekolah ini melakukan penyesuaian materi ajar agar lebih sesuai dengan kemampuan siswa berkebutuhan khusus. Materi tersebut disederhanakan dan disesuaikan dengan kondisi individu masing-masing siswa, memastikan bahwa mereka tetap mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Selain itu, sekolah ini juga menerapkan Program Pembelajaran Individu (PPI), yang memungkinkan setiap anak inklusi mendapatkan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangannya. Dalam sistem penilaian, SD Assalaam menggunakan sistem downgrade pada rapor khusus untuk anak inklusi, di mana hasil akademik mereka

dianalisis dan dicatat secara terpisah oleh *helper*, psikolog, serta orthopedagog yang selama ini menjadi pendamping anak inklusi. Selain penyesuaian dalam aspek akademik, sekolah ini juga secara aktif menyelenggarakan pelatihan dan seminar yang melibatkan pemateri khusus terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif guna meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dan staf sekolah dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul.

Sebaliknya, SDN 206 Putraco Indah tidak memiliki kebijakan atau program tertulis yang secara eksplisit mengatur pendidikan inklusif. Namun, beberapa guru di sekolah ini telah menunjukkan inisiatif pribadi dalam menyesuaikan materi pelajaran bagi anak inklusi. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan pemahaman mereka terhadap kebutuhan siswa, meskipun tidak ada panduan formal yang mengarahkan strategi tersebut. Sistem penilaian juga telah mengalami beberapa modifikasi, di mana guru melakukan pendekatan yang lebih fleksibel dalam mengevaluasi perkembangan anak inklusi. Akan tetapi, pendekatan yang dilakukan di SDN 206 Putraco Indah lebih bersifat *ad-hoc* dan bergantung pada inisiatif dan pengetahuan individu guru, tanpa adanya dukungan sistematis secara tertulis dari sekolah dalam bentuk program atau kebijakan khusus.

Dalam menghadapi tantangan dan hambatan dalam penerapan pendidikan inklusif, SD Assalaam Bandung telah

melakukan berbagai langkah strategis yang menunjukkan tingkat kesiapan yang lebih baik. Sekolah ini menyediakan berbagai fasilitas penunjang, termasuk ruangan khusus PPI yang berfungsi sebagai zona aman bagi anak inklusi ketika mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi atau mengalami kendala lainnya. Lokasi ruangan PPI yang berseberangan dengan ruang kelas reguler memungkinkan adanya intervensi yang cepat ketika terjadi permasalahan pada siswa inklusi. Di dalam ruangan ini, anak inklusi akan ditenangkan oleh tenaga profesional seperti psikolog anak dan *helper* yang memiliki pengalaman dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Keberadaan fasilitas ini memberikan solusi yang lebih terstruktur dalam menangani kendala yang muncul selama proses pembelajaran berlangsung. Di sisi lain, SDN 206 Putraco Indah memiliki cara tersendiri dalam mengatasi hambatan yang dialami oleh siswa inklusi. Salah satu strategi yang diterapkan adalah dengan memisahkan anak dari kelas ketika mereka mengalami tantrum atau kendala, serta memberikan makanan kecil untuk membantu menenangkan mereka. Meskipun strategi ini menunjukkan adanya perhatian terhadap kebutuhan anak inklusi, pendekatan ini masih bersifat sementara dan tidak didukung oleh fasilitas khusus yang dapat digunakan untuk menangani anak berkebutuhan khusus secara lebih efektif. Hingga saat ini, sekolah ini belum memiliki ruangan khusus yang

berfungsi sebagai tempat intervensi bagi siswa inklusi yang mengalami kesulitan selama pembelajaran.

Dari analisis yang telah dilakukan, terlihat bahwa SD Assalaam Bandung memiliki inisiatif yang lebih sistematis dan terencana dalam implementasi pendidikan inklusif dibandingkan dengan SDN 206 Putraco Indah. Keberadaan program penyesuaian yang tertulis, sistem penilaian yang lebih inklusif, serta dukungan dari tenaga profesional menjadi faktor utama yang membedakan pendekatan kedua sekolah ini. Sebaliknya, meskipun SDN 206 Putraco Indah telah menunjukkan inisiatif dalam menyesuaikan pembelajaran bagi siswa inklusi, sekolah ini masih belum memiliki acuan metode khusus dalam pembelajaran maupun penilaian serta belum didukung oleh kebijakan atau fasilitas yang memadai.

Perbedaan dalam strategi yang diterapkan juga mencerminkan bagaimana kepemimpinan sekolah berperan dalam menentukan arah pendidikan inklusif. Kepala sekolah di SD Assalaam telah menunjukkan kepemimpinan yang lebih proaktif dengan memberikan perhatian khusus pada penyediaan sumber daya dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung pendidikan inklusif. Sementara itu, kepala sekolah di SDN 206 Putraco Indah masih perlu mengembangkan langkah-langkah yang lebih strategis dalam memastikan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya bergantung

pada inisiatif individu guru, tetapi juga didukung oleh sistem yang lebih terstruktur.

Berdasarkan temuan ini, penting bagi SDN 206 Putraco Indah untuk mengembangkan inisiatif yang lebih komprehensif dalam menyediakan lingkungan belajar yang lebih inklusif. Sekolah ini perlu mempertimbangkan untuk merancang kebijakan yang lebih jelas terkait pendidikan inklusif, meningkatkan pelatihan bagi guru, serta menyediakan fasilitas yang lebih memadai untuk mendukung anak berkebutuhan khusus. Selain itu, inisiatif tidak seharusnya hanya bergantung pada dukungan dari pemerintah setempat, tetapi juga harus tumbuh dari dalam lingkungan sekolah itu sendiri agar dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan siswa inklusif.

Dengan adanya perbedaan pendekatan ini, dapat disimpulkan bahwa SD Assalaam Bandung telah menunjukkan model implementasi yang lebih matang dalam menjalankan pendidikan inklusif, sementara SDN 206 Putraco Indah masih berada dalam tahap pengembangan yang memerlukan dukungan lebih lanjut agar dapat mencapai hasil yang lebih optimal dalam mendukung siswa berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan dalam hal kebijakan, pelatihan guru, serta penyediaan fasilitas perlu terus diupayakan guna meningkatkan efektivitas pendidikan inklusif di kedua sekolah tersebut.

• **Kehandalan & Tanggung Jawab**

Tanggung jawab dalam memastikan perhatian bagi siswa inklusif merupakan aspek fundamental dalam pendidikan inklusif, di mana sekolah dan tenaga pendidik harus memberikan dukungan yang memadai agar setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang setara dengan teman-temannya.

SD Assalaam Bandung menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam aspek ini dengan menyediakan masing-masing 1 *helper* untuk 1 anak inklusif, untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. *Helper* ini berperan dalam membantu siswa dalam memahami materi pelajaran, menyesuaikan metode pembelajaran, serta mendukung aspek sosial dan emosional mereka di lingkungan sekolah. Selain itu, SD Assalaam juga melakukan asesmen awal sebelum siswa inklusif mulai belajar, sehingga strategi pendampingan yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan individu. Evaluasi berkala juga dilakukan untuk memastikan efektivitas dari bantuan yang diberikan. Sebaliknya, SDN 206 Putraco Indah menghadapi kendala dalam hal ini karena jumlah *helper* yang terbatas. Dengan hanya ada 1 *helper* dan 3 Guru PLB untuk mendampingi 37 siswa inklusif, perhatian yang diberikan tentunya masih kurang maksimal dan tidak efektif. Guru di SDN 206 Putraco Indah berusaha memberikan perhatian dengan menyesuaikan pola

komunikasi dan interaksi di kelas, tetapi tanpa adanya tenaga pendamping yang memadai, perhatian yang diberikan masih kurang intensif dibandingkan dengan yang diterapkan di SD Assalaam.

Penyesuaian materi pembelajaran juga menjadi salah satu bentuk tanggung jawab sekolah dalam memastikan bahwa siswa inklusif dapat mengakses pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. SD Assalaam Bandung menerapkan pendekatan yang lebih terstruktur dalam hal ini, di mana setiap siswa inklusif menjalani asesmen sebelum sekolah menyusun strategi pembelajaran yang sesuai. Materi pelajaran yang diberikan telah disesuaikan agar tetap dapat dipahami oleh siswa dengan kebutuhan khusus, baik dengan penyederhanaan konsep, penggunaan media pembelajaran yang lebih variatif, maupun dengan pendekatan individual sesuai dengan kemampuan kognitif masing-masing siswa. Selain itu, SD Assalaam juga mengadakan koordinasi dengan psikolog dan orthopedagog untuk memastikan bahwa materi pembelajaran yang diberikan selaras dengan perkembangan dan kebutuhan anak. Di sisi lain, SDN 206 Putraco Indah belum memiliki sistem yang sekomprehensif itu dalam menyesuaikan materi pembelajaran. Guru di sekolah ini lebih banyak melakukan penyesuaian berdasarkan pengalaman pribadi dan pengamatan langsung di kelas. Meskipun guru berupaya untuk menyederhanakan materi atau memberikan

metode pengajaran yang lebih fleksibel, pendekatan yang digunakan masih cenderung situasional dan sumber informasi yang diperoleh oleh para guru sebagai acuan adalah sumber internet yang belum akurat dan valid informasinya. Hal ini menyebabkan kurangnya standar yang jelas dalam memastikan bahwa seluruh siswa inklusif mendapatkan materi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Kesempatan setara dalam kegiatan sekolah juga menjadi indikator penting dalam keberhasilan pendidikan inklusif sesuai dengan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, setiap sekolah diwajibkan untuk menyediakan akses pendidikan yang setara dan tanpa diskriminasi, memastikan bahwa setiap siswa memperoleh haknya dalam proses pembelajaran, yang dimana kedua sekolah ini sudah mematuhi peraturan tersebut. SD Assalaam Bandung telah memastikan bahwa setiap siswa inklusif dapat mengikuti berbagai kegiatan sekolah, baik dalam bentuk akademik maupun non-akademik sesuai dengan. Dalam kegiatan ekstrakurikuler, misalnya, siswa inklusif tetap mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi, dengan dukungan dari *helper* yang selalu mendampingi mereka. Sekolah juga memberikan ruang bagi siswa inklusif untuk mengikuti acara atau kegiatan-kegiatan sekolah dengan mempertimbangkan kemampuan dan minat mereka. Dengan

adanya pendampingan yang memadai, siswa inklusif di SD Assalaam dapat lebih percaya diri dalam berinteraksi dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah tanpa merasa terpinggirkan. Sementara itu, di SDN 206 Putraco Indah, keterlibatan siswa inklusif dalam kegiatan sekolah juga sudah sangat baik. Guru dan tenaga pendidik di SDN 206 Putraco Indah percaya bahwa lingkungan yang sudah terbentuk dengan baik membuat siswa inklusif tidak mengalami diskriminasi dalam aktivitas sekolah. Pada kegiatan di luar kelas, seperti ekstrakurikuler, setiap anak inklusi juga turut disertakan tanpa adanya pengecualian sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan akademik dan non akademik di dalam maupun di luar kelas dengan baik.

Secara keseluruhan, tanggung jawab sekolah dalam memastikan perhatian bagi siswa inklusif, menyesuaikan materi pembelajaran, dan memberikan kesempatan setara dalam kegiatan sekolah menjadi faktor utama dalam keberhasilan pendidikan inklusif. SD Assalaam Bandung memiliki sistem yang lebih terstruktur dengan pendampingan yang lebih intensif, sedangkan SDN 206 Putraco Indah masih menghadapi kendala dalam aspek sumber daya dan perencanaan program. Dengan adanya perbaikan dalam aspek tenaga pendamping dan sistem pembelajaran yang lebih sistematis, pendidikan inklusif di kedua sekolah ini dapat berjalan dengan lebih efektif

sesuai dengan tujuan utama pendidikan inklusif yang diamanatkan dalam regulasi nasional.

B. Peran Pemerintah Kota Bandung dalam Penyelenggaraan Program Pendidikan Inklusif

• Anggaran Pendidikan Inklusif

Pemerintah Kota Bandung menunjukkan komitmennya terhadap sektor pendidikan dengan mengalokasikan lebih dari 24% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melampaui batas minimal 20% yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pada tahun 2023, anggaran pendidikan mencapai Rp1,9 triliun dari total APBD sebesar Rp7,2 triliun. Dana ini digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan, termasuk pendidikan inklusif yang bertujuan memberikan akses setara bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

Salah satu fokus utama dalam alokasi anggaran ini adalah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, seperti pembangunan dan perbaikan ruang kelas serta penyediaan fasilitas yang ramah bagi siswa penyandang disabilitas. Pemerintah juga mendukung pelatihan bagi tenaga pendidik agar lebih siap dalam menangani siswa inklusif, mengingat banyak guru masih kurang memiliki pemahaman yang memadai terkait pendidikan inklusif.

Selain itu, anggaran pendidikan juga dialokasikan untuk program Rawan

Melanjutkan Pendidikan (RMP), yang bertujuan membantu siswa yang berisiko tidak melanjutkan pendidikan karena berbagai kendala, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus. Program ini berupaya memastikan bahwa siswa dari kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dengan dukungan finansial yang memadai. Anggaran untuk program RMP berkisar antara Rp80 miliar hingga Rp130 miliar.

Namun, meskipun anggaran pendidikan inklusif cukup besar, tantangan dalam distribusi anggaran masih menjadi kendala. Beberapa sekolah di Kota Bandung, seperti SDN 206 Putraco Indah dan SD Assalaam, yang memiliki siswa berkebutuhan khusus, tidak mendapatkan dana khusus yang dialokasikan untuk program inklusi. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pendistribusian dana, yang berpotensi menghambat efektivitas implementasi pendidikan inklusif di berbagai sekolah. Kurangnya transparansi dan sistem pengawasan dalam alokasi dana juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan ketidakmerataan dalam pendanaan pendidikan inklusif di Kota Bandung.

Ketimpangan ini mengindikasikan perlunya evaluasi dalam sistem distribusi anggaran pendidikan inklusif agar benar-benar menjangkau sekolah yang membutuhkan. Tanpa distribusi yang merata, beberapa sekolah terpaksa mengandalkan

sumber daya internal atau mencari pendanaan tambahan, yang dapat berdampak pada kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa inklusif. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pemantauan dan pengawasan dalam realisasi anggaran pendidikan inklusif menjadi langkah penting yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kota Bandung.

- **Penyediaan Akomodasi Layak untuk Siswa Penyandang Disabilitas**

Dalam upaya mewujudkan pendidikan inklusif, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan berbagai regulasi yang memastikan penyediaan akomodasi layak bagi siswa penyandang disabilitas. Salah satu regulasi utama adalah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang mengatur berbagai aspek, termasuk kewajiban penyediaan aksesibilitas di sektor pendidikan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 juga mengatur standar akomodasi yang harus dipenuhi oleh sekolah dalam memberikan layanan pendidikan inklusif.

Regulasi ini mencakup penyediaan infrastruktur yang ramah disabilitas, seperti jalur akses bagi kursi roda, ruang kelas dengan desain yang sesuai, toilet aksesibel, serta penyediaan alat bantu belajar. Selain infrastruktur fisik, regulasi ini juga menekankan pentingnya penyesuaian metode pembelajaran dan kurikulum agar lebih inklusif serta pelatihan bagi tenaga pendidik

untuk memahami dan mengakomodasi kebutuhan siswa penyandang disabilitas.

Namun, meskipun regulasi telah ditetapkan, realisasinya di lapangan masih menghadapi kendala. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang sesuai untuk mendukung pendidikan inklusif. Banyak sekolah masih mengalami keterbatasan dalam menyediakan aksesibilitas yang layak, terutama karena keterbatasan anggaran dan kurangnya pemantauan dalam implementasi kebijakan ini.

Beberapa sekolah harus mengandalkan dana internal atau mencari sumber pendanaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan aksesibilitas bagi siswa inklusif. Akibatnya, sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan anggaran tidak dapat menyediakan fasilitas yang memadai, seperti ruang kelas dengan desain aksesibel, alat bantu belajar, atau pendampingan khusus bagi siswa berkebutuhan khusus.

Padahal, dalam regulasi yang telah ditetapkan, disebutkan bahwa penyediaan akomodasi dan fasilitas bagi siswa penyandang disabilitas harus didukung oleh anggaran pemerintah. Namun, dalam praktiknya, distribusi bantuan tidak selalu merata, sehingga sekolah dengan keterbatasan sumber daya sering kali menghadapi tantangan dalam menyediakan lingkungan belajar yang inklusif.

Secara keseluruhan, meskipun Pemerintah Kota Bandung telah menunjukkan

upaya dalam mendukung pendidikan inklusif melalui alokasi anggaran dan regulasi, tantangan dalam distribusi dana serta penyediaan fasilitas yang memadai masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, sekolah, serta pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa setiap siswa penyandang disabilitas dapat memperoleh pendidikan yang setara dan berkualitas sesuai dengan prinsip pendidikan inklusif.

C. Faktor Penghambat Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Faktor yang menghambat penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Banyak guru yang belum memiliki keahlian dalam pendidikan inklusif, sehingga mereka kesulitan menyesuaikan metode pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, minimnya tenaga pendamping seperti *helper* atau Guru Pembimbing Khusus (GPK) juga berdampak pada kualitas pembelajaran. Di SDN 206 Putraco Indah, misalnya, keterbatasan jumlah tenaga pendamping membuat guru reguler harus menangani siswa inklusif tanpa dukungan yang memadai, yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas pembelajaran.

Selain keterbatasan SDM, kendala lainnya adalah kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pendidikan inklusif. Banyak sekolah belum memiliki ruang khusus atau

alat bantu terapi yang diperlukan bagi siswa berkebutuhan khusus. Ketiadaan ruang aman (safe zone) dan teknologi asistif menjadi tantangan dalam memastikan siswa inklusif dapat belajar dengan nyaman dan efektif. Kondisi ini diperburuk dengan keterbatasan kerja sama dengan pihak eksternal, di mana sekolah masih minim kolaborasi dengan psikolog, orthopedagog, serta lembaga yang berfokus pada pendidikan inklusif. Kurangnya pelatihan dari profesional menyebabkan guru dan tenaga kependidikan kesulitan memahami kebutuhan spesifik siswa inklusif, sehingga pendekatan yang diberikan tidak selalu sesuai.

Faktor penghambat lainnya adalah keterbatasan dana yang tersedia untuk pendidikan inklusif. Minimnya anggaran di beberapa sekolah, terutama di sekolah negeri, menghambat penyediaan alat bantu, pelatihan guru, serta ruang belajar yang lebih aksesibel bagi siswa inklusif. Selain itu, tidak adanya standar yang jelas dalam penyesuaian materi pembelajaran menyebabkan ketidakkonsistenan dalam proses belajar-mengajar. Beberapa sekolah belum memiliki sistem yang terstruktur dalam menyesuaikan kurikulum bagi siswa inklusif, sehingga pendekatan yang diberikan cenderung bervariasi dan kurang efektif. Lebih lanjut, budaya dan kesadaran inklusif di lingkungan sekolah masih terbatas, di mana stigma terhadap siswa berkebutuhan khusus masih ditemukan dalam interaksi sosial. Kurangnya

pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya pendidikan inklusif di kalangan tenaga pendidik, siswa, maupun orang tua membuat upaya menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung keberagaman masih menghadapi berbagai tantangan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis kinerja implementasi pendidikan inklusif di SD Negeri dan Swasta di Kota Bandung berdasarkan lima indikator dalam teori Analisis Kinerja Robbins: kualitas, kuantitas, kerja sama, inisiatif, dan keandalan. Hasil menunjukkan bahwa SD Swasta, seperti SD Assalaam, memiliki keunggulan dalam fasilitas, tenaga pendamping, serta pelatihan bagi guru. Sementara itu, SD Negeri 206 Putraco Indah menghadapi kendala dalam keterbatasan sarana, kurangnya pelatihan guru, serta jumlah siswa inklusi yang lebih tinggi.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa SD Swasta lebih siap dalam menerapkan pendidikan inklusif dibandingkan SD Negeri yang masih bergelut dengan keterbatasan sumber daya dan dukungan pemerintah. Faktor utama yang menghambat efektivitas pendidikan inklusif di SD Negeri adalah keterbatasan anggaran, minimnya pelatihan, serta ketidakseimbangan antara jumlah siswa inklusi dan fasilitas yang tersedia. Sementara itu, tantangan utama di SD Swasta adalah biaya yang lebih tinggi, sehingga akses bagi

siswa inklusi dari keluarga kurang mampu menjadi terbatas.

SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas pendidikan inklusif, diperlukan upaya konkret dari berbagai pihak. Pemerintah perlu memperkuat pelatihan guru, meningkatkan ketersediaan tenaga pendamping, serta memperjelas kebijakan penerimaan siswa inklusi agar sesuai dengan kapasitas sekolah. Kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan lembaga terkait juga perlu diperkuat guna memastikan pendidikan inklusif dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Allen, K. E., & Cowdery, G. E. (2000). *The Exceptional Child: Inclusion in Early Childhood Education*. Albany, NY: Delmar.

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Azhar, S. (2023). *Desain Pengembangan Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Santa Angela Bandung*. Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang, 8(2), 2470–2481.

Badan Pusat Statistik Kota Bandung. (n.d.). *Jumlah Sekolah Dasar di Kota Bandung*.

Badan Pusat Statistik Kota Bandung. (n.d.). *Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Bandung*.

Badan Pusat Statistik Kota Bandung. (n.d.). *Angka Partisipasi Kasar di Kota Bandung*.

Badan Pusat Statistik Kota Bandung. (n.d.). *Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka*

Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Formal dan Nonformal Penduduk Menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin 2022.

Danim, S. (2003). *Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Bandung: Pustaka Setia.

Darma, I. P., & Rusyidi, B. (2015). *Pelaksanaan Sekolah Inklusi di Indonesia*. Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2), 223-227.

Dewi, N. K. (2017). *Manfaat Program Pendidikan Inklusi untuk AUD*. Jurnal Pendidikan Anak, 6(1), 12-19.

Hidayati, W. R., & Warmansyah, J. (2021). *Pendidikan inklusi sebagai solusi dalam pelayanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus*. Aulad: Journal on Early Childhood.

Irawan, M. F., Bella, S., & Latifah, A. (2024). *Teachers and parents perceptions of the 9-year compulsory education policy in Indonesia*. Journal of Insan Mulia Education.

Islam, A. D., Timorochmadi, F., Fakhrudin, M. Y., Yoseptry, R., Ratnawulan, T., & Rahayu, N. S. (2024). *Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bandung*. Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan, 12(1), 362–377.

Perundang – Undangan

Pemerintah Republik Indonesia. (1989). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Pemerintah RI.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 420 Tahun 2016 tentang "Petunjuk pelaksanaan pengelolaan bantuan operasional sekolah kota Bandung, Bantuan Walikota khusus sekolah, Bantuan operasional sekolah siswa kurang mampu, Bantuan walikota khusus mahasiswa pendidikan karakter, Bandung Masagi, Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan dan literasi serta layanan pendidikan inklusif pada penyelenggaraan program sekolah gratis pemerintah kota Bandung tahun anggaran 2016.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus.